

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada berdasarkan penelitian yang diukur melalui rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada periode 2017-2021 sebesar 7,05%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada sangat kurang.
2. Kemandirian rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada periode 2017-2021 sebesar 7,65%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi masih rendah sekali dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.
3. Efektivitas pendapatan rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada periode 2017-2021 sebesar 84,98%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya cukup efektif untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan.
4. Efisiensi Pendapatan Asli Daerah rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada periode 2017-2021 sebesar 7,18%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerahnya sangat efisien.

5. Belanja langsung rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada periode 2017-2021 sebesar 23,37%; dan belanja tidak langsung rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada periode 2017-2021 sebesar 63,73%.
6. Pertumbuhan PAD rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada periode 2017-2021 sebesar 1,34%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada baik dalam mempertahankan realisasi penerimaan PAD.
7. Pertumbuhan pendapatan rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada periode 2017-2021 sebesar 1,14%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada baik dalam mempertahankan pertumbuhan pendapatannya.
8. Pertumbuhan belanja rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada periode 2017-2021 sebesar -0,08%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada masih kurang baik dalam mempertahankan realisasi pertumbuhan belanjanya.

6.2 Saran

Melihat permasalahan yang ada, dan dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap rasio pengelolaan keuangan terhadap APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, maka saran – saran yang mungkin bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah kabupaten Ngada adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.
2. Pemerintah Kabupaten Ngada perlu meningkatkan pembangunan serta menyediakan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan perekonomian Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir.
4. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya dengan mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan penambahan waktu dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. A. J. (2018). Analisis sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95-104.
- Darise, N. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). In Jakarta: Indeks.
- Eko Widodo,Suparno.2015. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR
- Elmi, B. (2002). Keuangan pemerintah daerah otonom di Indonesia. (*No Title*).
- Fahmi, I. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Kasus dan Solusi). *Cetakan Ketiga. Bandung: CV. Alfabeta*.
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107-124.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33-48.
- Halim, Abdul. 2002. Bunga Rampai Manajemen Daerah edisi revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____ (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat : Jakarta.
- _____ (2012). Akuntansi Sektor Publik akuntansi keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- _____ (2014). Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2013). Analisis atas laporan keuangan. *Cetakan ke-11. Edisi, 1*.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34-38.
- Hardiyansyah, H. (2022). Analisis Kinerja Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Eksternal Melalui Survey Kepuasan Masyarakat. *Analisis Kinerja Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Eksternal Melalui Survey Kepuasan Masyarakat*.

- Hery, 2015, Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan, CAPS, Yogyakarta.
- Kaunang Enjelita C dkk. 2016. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah (studi pada Kota Manado tahun 2010-2014)*. Universitas Sam Ratulangi Volume 16 No.02 Tahun 2016
- Kaur, S. (2023). Penyajian Laporan Keuangan Sektor Publik. *Circle Archive*, 1(1).
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. PT. Erlangga: Jakarta.
- _____ (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- _____ (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mangkunegara, Anwar Prabu (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Remaja Rosdakarya*. Bandung
- Mangkunegara, A. P. 2013. *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*.
- _____ (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo, (2002), "Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi
- _____ (2009). Akuntansi Sektor Publik. In *Yogyakarta: ANDI*.
- Mohamad Mahsun. (2011). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE: Yogyakarta.
- Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justisia*, 8(1), 69-79.
- Mulyadi. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bogor: Inmedia.
- Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2).
- Novita Wahyu Setyawati, N. (2018). Stres kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3(3).
- Nurhayati. 2015. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. Vol.4 No.1.

- Pemerintah Indonesia, 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Poyoh Marciah C dkk. 2017. *Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Keuangan daerah Kota Tomohon: universitas Sam Ratulangi Manado vol.5 No.2 Juni 2017*
- Ropa, M. O. (2016). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2).
- Sari, I. I., & Yousida, I. (2019). Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5(1).
- Sinaga, Poltak. 2014. *Teori portofolio dan analisis investasi teori dan aplikasi*. Medan : Penerbit Mitra.
- Sriwahyuni, B. (2019). Analisis Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Instrumen Pengawasan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Kab. Enrekang.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81-92.
- Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota DI Yogyakarta). *InFestasi*, 11(2), 118-136.
- Sularso dan Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.
- Turley, G., Robbins, G., & McNena, S. (2015). A Framework To Measure The Financial Performance Of Local Governments. *Local Government Studies*, 41(3), 401-420.
- Wachid, A., Kusworo, & Sujarwo. (2014). Perkembangan keuangan daerah di Jawa Timur Pada Masa Desentralisasi Fiskal. Malang.
- Widjaja, HAW. (2001). Daerah Otonom. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.

Widodo. 2001. Analisa Rasio Keuangan pada APBD Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. UPP YKPN

Yani, Ahmad.2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.